

**MANAGEMENT STRATEGY OF ENDOWMENT FUNDS AND INCOME
GENERATING UNITS (IGU) IN REALIZING FINANCIAL INDEPENDENCE OF
ISLAMIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS:
AN ECONOMIC TRANSFORMATION ANALYSIS BASED ON ZISWAF**

Ahmad Fikri¹, Herwina Bahar²

¹²Universitas Muhammadiyah Jakarta

Alamat e-mail: ¹Ahmad.fikri36@gmail.com, ²Herwina.bahar@umj.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the strategic urgency of transforming the financing model of Islamic educational institutions in Indonesia from a traditional charity-based approach toward a sustainable social enterprise framework. Driven by structural fiscal limitations, sharp allocative disparities within public budgets (APBN/APBD), and the escalating commercialization of education, this research investigates the integration of public financing with Islamic Social Finance. Utilizing a qualitative-conceptual methodology with an economic and pedagogical approach, this paper evaluates the efficacy of an Integrated Islamic Social Finance (IISF) model and a Tiered Funding System. This system synthesizes productive waqf as a perpetual capital base, zakat as targeted tuition relief for marginalized students (dhuafa), and infak/sedekah as dynamic innovation funds. Furthermore, it explores the optimal deployment of institutional Income Generating Units (IGUs) alongside digital modernizations. The findings demonstrate that professionalizing asset management through mechanisms like Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) and establishing diversified sharia-compliant business units structurally insulates institutions from chronic dependence on student tuition fees, thereby fulfilling the dual mandate of teacher welfare and inclusive accessibility. Crucially, the adoption of digital technologies specifically Blockchain and Islamic Fintech emerges as an ethical and operational necessity under the Maqasid al-Shariah paradigm to safeguard public funds (Hifz al-Mal) via absolute, real-time transparency and automated, immutable auditing. This integrated model provides a robust conceptual blueprint for achieving long-term financial sovereignty, enhancing internal and external institutional efficiencies, and preserving the core socio-spiritual mission of Islamic education in the digital disruption era.

Keywords: Endowment Fund, Income Generating Units (IGU), ZISWAF, Financial Independence, Blockchain, Maqasid al-Shariah.

ABSTRAK

Percepatan transformasi digital telah mengubah paradigma pengelolaan pendidikan, termasuk pendidikan Islam nonformal di lingkungan korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis transformasi digital melalui integrasi Artificial Intelligence (AI), Big Data Analytics, Blockchain, dan teknologi pembelajaran imersif dalam memperkuat program pendidikan Islam di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya WIKA. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui telaah berbagai literatur ilmiah, dokumen kebijakan, serta penelitian mutakhir yang berkaitan dengan pendidikan digital dan manajemen pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan peluang signifikan untuk meningkatkan efektivitas, aksesibilitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan kegiatan pendidikan Islam di lingkungan kerja. Integrasi AI memungkinkan personalisasi pembelajaran, Big Data mendukung pengambilan keputusan berbasis data, Blockchain meningkatkan transparansi dan keabsahan data pendidikan, sedangkan teknologi imersif seperti Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) memperkuat pengalaman belajar berbasis praktik. Penelitian ini juga menawarkan model Digital Islamic Learning Ecosystem yang mengintegrasikan inovasi teknologi dengan nilai-nilai Islam berupa amanah, syura, itqan, dan adl. Penelitian menyimpulkan bahwa transformasi digital pendidikan Islam nonformal tidak hanya berorientasi pada adopsi teknologi, tetapi harus menjadi instrumen strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan memiliki ketahanan spiritual menuju Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Manajemen Pendidikan Islam, Artificial Intelligence, Big Data, Pembelajaran Imersif, Indonesia Emas 2045

A. Pendahuluan (12 pt dan Bold)

Pendidikan dalam paradigma Islam dipandang sebagai investasi modal manusia (human investment) yang memiliki urgensi ganda: meningkatkan produktivitas ekonomi material dan memperkuat kualitas spiritual-moral bangsa. Secara teoretis, investasi melalui pendidikan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional karena mampu meningkatkan kualitas

sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Di Indonesia, pengakuan terhadap peran strategis pendidikan diwujudkan melalui mandat konstitusi Pasal 31 UUD NRI 1945, yang mewajibkan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Secara makro, komitmen fiskal pemerintah terus meningkat. Pada tahun 2025, alokasi anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp724,3 triliun, dan diproyeksikan akan naik sebesar 9,8% pada tahun 2026 menjadi Rp757,8 triliun. Namun, distribusi anggaran tersebut masih menghadapi tantangan disparitas yang tajam. Realitas empiris menunjukkan adanya ketimpangan alokasi antara lembaga pendidikan di bawah naungan Kemendikbudristek dengan madrasah serta pesantren di bawah Kementerian Agama. Madrasah swasta, misalnya, seringkali terhambat oleh jalur birokrasi sentralistik yang panjang sehingga sulit mengakses dana hibah APBD daerah dibandingkan sekolah umum.

Keterbatasan dukungan finansial negara ini memicu fenomena komersialisasi pendidikan yang masif. Ketika bantuan operasional pemerintah tidak mencukupi, lembaga pendidikan Islam terpaksa membebankan biaya tinggi kepada peserta didik sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*). Akibatnya, pendidikan mulai diposisikan sebagai sektor jasa industri yang diperdagangkan, di

mana akses terhadap kualitas pendidikan hanya dimiliki oleh kelompok elit ekonomi. Hal ini menciptakan dikotomi antara tuntutan profesionalisme/kesejahteraan pendidik dengan kewajiban memberikan layanan inklusif bagi kaum dhuafa, yang secara filosofis bertentangan dengan prinsip Maqasid al-Shariah dalam melindungi akal (*hifz al-'aql*) tanpa membebani harta (*hifz al-mal*) umat secara eksploitatif.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Di tingkat pendidikan tinggi, kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) juga menuai kritik tajam. Transformasi status institusi menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) memberikan otonomi keuangan, namun seringkali diikuti dengan kenaikan tarif UKT yang signifikan untuk menutupi biaya operasional yang tidak terpenuhi oleh APBN. Sekitar 40% dari total dana perguruan tinggi nasional pada tahun 2024 dikumpulkan langsung dari mahasiswa, yang mengindikasikan adanya pergeseran beban tanggung

jawab negara kepada individu masyarakat.

حَسِبِ الْأَصْلَ وَسَيِّلِ الثَّمَرَ

"Tahanlah pokoknya dan sedekahkan (manfaatkan) hasilnya." (HR. Muslim)

Oleh karena itu, diperlukan transformasi fundamental dalam model manajemen pembiayaan pendidikan Islam. Paradigma kedermawanan tradisional (charity-based) harus mulai bergeser menuju model kewirausahaan sosial (social enterprise) yang mandiri. Strategi inovatif seperti pengembangan Endowment Fund (Dana Abadi) berbasis wakaf tunai dan pembentukan Income Generating Units (IGU) menjadi keniscayaan. Lahirnya Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren memberikan harapan baru bagi keberlanjutan ekonomi pesantren melalui dukungan Dana Abadi Pesantren.

Transformasi ini juga menuntut adopsi teknologi digital. Penggunaan Blockchain dan Fintech Syariah bukan lagi sekadar tren, melainkan keharusan etis untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dana umat secara real-time. Melalui integrasi instrumen keuangan sosial

Islam (Integrated Islamic Social Finance) yang profesional, lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu mewujudkan kemandirian finansial yang berkelanjutan tanpa mengorbankan identitas spiritual dan misi sosial-kemanusiaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi krusial untuk membedah secara komprehensif efisiensi pembiayaan saat ini serta merumuskan model inovasi pendanaan yang selaras dengan nilai keadilan ekonomi Islam di era disrupsi digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian konseptual-analitis (conceptual research). Berbeda dengan penelitian lapangan (field research) empiris yang menguji hipotesis statistik atau observasi langsung, penelitian konseptual berfokus pada eksplorasi mendalam, sintesis literatur, dan rekonstruksi kerangka teoretis serta regulasi hukum kontemporer untuk menjawab kompleksitas permasalahan pembiayaan pendidikan Islam. Pendekatan kualitatif dipilih untuk membedah aspek kebijakan, dinamika ekonomi, serta nilai-nilai normatif

finansial. Riset ini mengawinkan teori ekonomi modern seperti Teori Modal Manusia (Human Capital Theory), Resource Dependence Theory, dan prinsip keberlanjutan fiskal dengan nilai aksiologis keuangan sosial Islam (Islamic Social Finance) dan paradigma Maqasid al-Shariah. Melalui jenis penelitian ini, struktur pembiayaan publik dan fenomena komersialisasi dianalisis secara kritis untuk menghasilkan cetak biru model baru yang adaptif, yakni Integrated Islamic Social Finance (IISF).

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang bersifat kualitatif dan memiliki kredibilitas otoritatif yang diintegrasikan ke dalam sebuah paragraf naratif yang utuh. Sumber data tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, diawali oleh data normatif-yuridis berupa dokumen hukum dan regulasi negara, termasuk Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, yang disandingkan dengan teks jurisprudensi (fikih) ekonomi syariah

terkait konsep ta'bid al-asl (keabadian pokok aset) dan tasbil al-manfa'ah (penyaluran hasil). Kategori kedua diisi oleh dokumen finansial dan kebijakan empiris yang meliputi proyeksi fiskal anggaran pendidikan nasional (APBN 2025-2026) serta laporan hasil kajian lembaga pengawas publik, salah satunya adalah Laporan Kajian Kedeputan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024 terkait tata kelola dan potensi disparitas alokasi anggaran pendidikan. Terakhir, kategori ketiga bersumber dari literatur akademik kontemporer yang berupa artikel jurnal ilmiah bereputasi, disertasi doktoral, dan prosiding konferensi internasional yang mengkaji secara spesifik mengenai implementasi Endowment Fund, Income Generating Units (IGU), serta pemanfaatan teknologi digital seperti Blockchain dan Fintech Syariah dalam tata kelola dana sosial Islam.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka (library research) dengan teknik dokumentasi yang dijalankan secara sistematis melalui tiga tahapan utama yang saling berkesinambungan. Prosedur ini diawali dengan tahap identifikasi

dan penjaringan (filtering), di mana peneliti melakukan penelusuran dokumen secara intensif pada berbagai database ilmiah bereputasi, seperti Scopus, Google Scholar, dan SINTA, menggunakan kata kunci logika Boolean seperti "Pembiayaan Pendidikan Islam" AND "Dana Abadi" OR "Wakaf Produktif" AND "Blockchain Transparansi". Selanjutnya, dokumen-dokumen yang telah diaring masuk ke dalam tahap seleksi dan verifikasi guna menguji tingkat kredibilitas, validitas keilmuan, serta relevansi mutakhir dari setiap sumber, sehingga data yang diambil terjamin memenuhi standar kualitas riset akademik pascasarjana. Proses pengumpulan data ini diakhiri dengan tahap edisi dan kategorisasi (*excerptation*), yaitu kegiatan mencatat, mengutip, dan mengelompokkan data substansial termasuk data tren anggaran pendidikan nasional serta formula matematis fungsi produksi modal manusia ke dalam matriks pemikiran terstruktur berdasarkan tema analisis utama, yang meliputi efisiensi internal, efisiensi eksternal, dan strategi mitigasi komersialisasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Integrasi Pembiayaan Publik dan Islamic Social Finance dalam

mewujudkan Kemandirian Finansial Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan struktural dalam pembiayaan yang bersumber dari anggaran negara. Secara makro, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2025 mencapai Rp724,3 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp757,8 triliun pada 2026. Namun, analisis kritis menunjukkan adanya disparitas alokatif yang tajam. Laporan Kajian KPK tahun 2024 mengungkapkan bahwa bantuan operasional per mahasiswa pada Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) secara signifikan lebih besar dibandingkan bantuan operasional yang diterima oleh mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah Kementerian Agama.

Dalam menghadapi keterbatasan fiskal publik dan hambatan birokrasi sentralistik yang menghambat akses madrasah swasta terhadap dana APBD, model Integrated Islamic Social Finance (IISF) muncul sebagai solusi integratif yang efektif. Berdasarkan temuan empiris, pengelolaan keuangan sosial

Islam yang terintegrasi terbukti 12% lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan lembaga dibandingkan pengelolaan secara parsial.

Model ini mengimplementasikan mekanisme kerja berjenjang (Tiered Funding System) sebagai berikut:

1. Wakaf Produktif sebagai Basis Kapital: Digunakan untuk membangun aset produktif seperti agribisnis atau ritel (contoh: minimarket Basmalah di Sidogiri) yang menghasilkan aliran pendapatan tetap (perpetual income).
2. Zakat untuk Subsidi Pendidikan: Dialokasikan khusus untuk bantuan biaya pendidikan langsung bagi santri/mahasiswa kategori mustahik guna menjamin aksesibilitas.
3. Sedekah/Infak sebagai Dana Inovasi: Berfungsi mendukung akselerasi teknologi dan riset tanpa mengganggu pokok dana abadi.

Sistem pembiayaan pendidikan Islam di Indonesia pada umumnya masih bergantung pada dua sumber utama, yaitu pembiayaan publik yang berasal dari pemerintah serta pembiayaan yang berasal dari

masyarakat. Namun dalam praktiknya, banyak lembaga pendidikan Islam terutama madrasah swasta dan pesantren menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan publik. Kondisi ini menuntut adanya model pembiayaan alternatif yang mampu memperkuat kemandirian finansial lembaga pendidikan.

Integrasi antara pembiayaan publik dengan instrumen keuangan sosial Islam merupakan salah satu pendekatan strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pembiayaan publik melalui APBN dan APBD berfungsi sebagai sumber pendanaan dasar yang digunakan untuk mendukung operasional pendidikan, seperti pembayaran gaji guru, pembangunan fasilitas pendidikan, serta penyediaan sarana pembelajaran.

Namun pembiayaan publik tidak selalu mampu memenuhi seluruh kebutuhan operasional lembaga pendidikan. Oleh karena itu, integrasi dengan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf menjadi sangat penting.

Instrumen filantropi Islam memiliki potensi besar dalam

mendukung pembiayaan pendidikan. Zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu, sementara wakaf dapat digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan atau menciptakan dana abadi pendidikan yang memberikan pendapatan berkelanjutan bagi lembaga pendidikan.

Model integrasi ini dikenal sebagai Integrated Islamic Social Finance, yaitu sistem pengelolaan keuangan sosial Islam yang mengintegrasikan berbagai instrumen filantropi untuk mendukung pembangunan sosial secara berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan, integrasi ini memungkinkan lembaga pendidikan Islam untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan ini, dana publik dapat digunakan sebagai pembiayaan dasar operasional lembaga pendidikan, sementara dana ZISWAF dapat digunakan untuk mendukung program-program strategis seperti pemberian beasiswa, pembangunan fasilitas pendidikan, serta pengembangan inovasi pembelajaran.

Dengan demikian, integrasi antara pembiayaan publik dan instrumen keuangan sosial Islam dapat menjadi solusi strategis dalam mewujudkan kemandirian finansial lembaga pendidikan Islam.

B. Implementasi Efisiensi Internal dan Efisiensi Eksternal dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Efisiensi dalam manajemen pembiayaan pendidikan Islam merupakan manifestasi nilai amanah untuk menghindari tabzir (pemborosan). Analisis efisiensi internal berfokus pada optimasi biaya per siswa (unit cost), yang secara alami cenderung meningkat sepadan dengan jenjang pendidikan. Strategi penguatan efisiensi internal yang paling krusial di era digital adalah melalui digitalisasi sistem informasi keuangan. Hasil riset menunjukkan bahwa implementasi sistem pelaporan anggaran secara real-time di madrasah mampu menurunkan biaya administrasi hingga 35%.

Di sisi lain, efisiensi eksternal diukur melalui relevansi lulusan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Penulisan makalah ini menemukan bahwa model kemitraan industri pada pesantren

vokasi (seperti program teknisi komputer atau perbankan syariah) mampu meningkatkan daya saing lulusan secara signifikan. Investasi pada modal manusia (human capital) di lembaga pendidikan Islam tidak hanya bertujuan menghasilkan produktivitas material, tetapi juga membangun modal sosial melalui pembentukan Akhlaq al-Karimah, yang merupakan diferensiasi utama dalam memenangkan persaingan global di era Society 5.0.

Efisiensi pembiayaan Pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pengelolaan lembaga pendidikan. Efisiensi pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan penghematan biaya, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan lembaga pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan.

Efisiensi pembiayaan pendidikan dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal berkaitan dengan kemampuan lembaga pendidikan dalam mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal dalam proses

pendidikan. Efisiensi internal dapat diukur melalui beberapa indikator seperti biaya per siswa, tingkat kelulusan siswa, tingkat putus sekolah, serta efektivitas penggunaan anggaran pendidikan.

Lembaga pendidikan yang memiliki efisiensi internal yang tinggi mampu menghasilkan output pendidikan yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Hal ini dapat dicapai melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran.

Sementara itu, efisiensi eksternal berkaitan dengan dampak pendidikan terhadap masyarakat dan perekonomian. Efisiensi eksternal dapat diukur melalui kontribusi lulusan terhadap pembangunan ekonomi, tingkat penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks pendidikan Islam, efisiensi eksternal tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek moral dan sosial. Lulusan lembaga pendidikan Islam diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang baik, tetapi juga memiliki karakter dan akhlak yang

baik sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penerapan analisis efisiensi dalam pembiayaan pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

C. Strategi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Komersialisasi Pendidikan

Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diperkuat oleh Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 telah memicu kontroversi karena dianggap mempercepat tren komersialisasi pendidikan. Analisis kritis menunjukkan bahwa status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) seringkali diikuti dengan kenaikan tarif UKT guna menutupi kekurangan dana operasional dari APBN. Faktanya, sekitar 40% atau Rp15,5 triliun dari total dana perguruan tinggi nasional pada 2024 dikumpulkan langsung dari mahasiswa melalui UKT.

Untuk menavigasi dilema ini, strategi manajemen pembiayaan Islam harus direkonstruksi berdasarkan paradigma Maqasid al-

Shariah, khususnya perlindungan terhadap akal (hifz al-'aql) dan harta (hifz al-mal). Kemandirian finansial yang dicapai melalui Income Generating Units (IGU) memungkinkan lembaga untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada iuran siswa. Contoh sukses di Pesantren Nurul Iman Bogor membuktikan bahwa unit bisnis yang dikelola secara profesional dapat membiayai seluruh operasional pendidikan, sehingga layanan pendidikan dapat diberikan secara gratis atau terjangkau bagi umat tanpa mengurangi kesejahteraan tenaga pendidik.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini adalah meningkatnya komersialisasi pendidikan. Ketika dukungan finansial dari pemerintah tidak mencukupi, banyak lembaga pendidikan terpaksa meningkatkan biaya pendidikan untuk menutupi kebutuhan operasional.

Kondisi ini berpotensi menciptakan kesenjangan akses pendidikan antara kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi dengan kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pendidikan seharusnya tidak menjadi komoditas yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Pendidikan merupakan hak setiap individu dan memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan strategi manajemen pembiayaan yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan finansial lembaga dengan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah diversifikasi sumber pendanaan. Lembaga pendidikan tidak seharusnya hanya bergantung pada biaya pendidikan dari peserta didik, tetapi juga perlu mengembangkan sumber pendanaan alternatif seperti dana wakaf, zakat, serta unit usaha produktif.

Selain itu, pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Strategi lainnya adalah pengembangan unit usaha lembaga pendidikan yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan untuk

mendukung operasional lembaga. Unit usaha ini dapat berupa koperasi sekolah, usaha pertanian, usaha percetakan, serta berbagai jenis usaha lainnya yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan.

Melalui strategi ini, lembaga pendidikan dapat mengurangi ketergantungan pada biaya pendidikan dari peserta didik serta tetap mempertahankan prinsip keadilan dalam akses pendidikan.

D. Optimalisasi Endowment Fund dan Income Generating Units dalam Pembiayaan Pendidikan Islam

Inovasi pendanaan melalui Endowment Fund (Dana Abadi) di Indonesia kini mendapatkan legitimasi kuat melalui Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Namun, pengelolaan dana abadi ini menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pengelola; data menunjukkan hanya sekitar 12% manajer pesantren yang terlatih secara profesional dalam manajemen investasi wakaf produktif.

Sebagai langkah transformatif, adopsi teknologi Blockchain menjadi keharusan etis guna mewujudkan

transparansi mutlak (hifz al-mal).
Blockchain memungkinkan:

1. Pencatatan Tak Terbantahkan (Immutability): Seluruh transaksi ZISWAF dan hasil unit usaha tercatat secara permanen dan transparan, sehingga meminimalkan risiko korupsi atau penyimpangan anggaran.
2. Smart Contracts: Otomatisasi distribusi beasiswa atau dana operasional hanya kepada penerima yang memenuhi kriteria (mustahik), sehingga meningkatkan efisiensi verifikasi.
3. Aksesibilitas Global: Penggunaan Islamic Crowdfunding berbasis digital memperluas jangkauan penggalangan dana wakaf tunai secara transparan bagi masyarakat luas.

Melalui sinergi antara kebijakan negara (seperti pembentukan Ditjen Pesantren di tahun 2026) dan inovasi teknologi digital, lembaga pendidikan Islam dapat mewujudkan kemandirian finansial yang kokoh, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pengembangan endowment fund dan income generating units

merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kemandirian finansial lembaga pendidikan Islam.

Endowment fund atau dana abadi merupakan dana yang dikelola secara profesional untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan lembaga pendidikan. Dalam sistem ini, dana pokok tidak digunakan secara langsung tetapi diinvestasikan sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan.

Dalam konteks pendidikan Islam, konsep endowment fund memiliki kesamaan dengan konsep wakaf produktif. Wakaf produktif memungkinkan aset wakaf dikelola secara produktif sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung operasional lembaga pendidikan.

Selain endowment fund, lembaga pendidikan juga dapat mengembangkan income generating units sebagai sumber pendapatan tambahan. IGU merupakan unit usaha yang dimiliki oleh lembaga pendidikan untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan.

Pengembangan IGU dapat dilakukan melalui berbagai sektor usaha seperti agribisnis, perdagangan, jasa, serta pengelolaan properti. Pendapatan dari unit usaha ini dapat digunakan untuk membiayai operasional lembaga pendidikan serta memberikan subsidi pendidikan bagi siswa yang kurang mampu.

Beberapa pesantren di Indonesia telah berhasil mengembangkan model pembiayaan pendidikan berbasis unit usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap operasional lembaga pendidikan.

Pengembangan endowment fund dan income generating units tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi lembaga pendidikan, tetapi juga memberikan peluang bagi peserta didik untuk belajar tentang kewirausahaan serta pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa integrasi instrumen keuangan sosial Islam dengan inovasi manajemen keuangan pendidikan merupakan strategi yang potensial dalam mewujudkan kemandirian finansial lembaga pendidikan Islam di era disrupsi digital.

D. Kesimpulan

Integrasi antara pembiayaan publik (APBN/APBD) dengan instrumen keuangan sosial Islam (ZISWAF) terbukti menjadi model yang efektif dalam mewujudkan kemandirian finansial lembaga pendidikan Islam. Model Integrated Islamic Social Finance mampu menciptakan sistem pendanaan yang lebih stabil, berkelanjutan, dan berkeadilan dengan memadukan fungsi wakaf sebagai kapital abadi, zakat sebagai subsidi langsung, serta infak dan sedekah sebagai dana inovasi. Dengan integrasi ini, lembaga pendidikan tidak lagi bergantung secara penuh pada bantuan pemerintah atau iuran peserta didik.

Implementasi efisiensi internal dan eksternal dalam manajemen pembiayaan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan dan daya saing lembaga. Efisiensi internal memastikan optimalisasi penggunaan sumber daya melalui pengelolaan biaya, peningkatan kualitas pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Sementara efisiensi eksternal tercermin dari kualitas lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik tetapi juga memiliki akhlak

yang baik serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Strategi manajemen pembiayaan pendidikan Islam dalam menghadapi komersialisasi harus berlandaskan prinsip Maqasid al-Shariah, dengan menyeimbangkan antara kebutuhan finansial lembaga dan keadilan sosial. Diversifikasi sumber pendanaan melalui ZISWAF dan pengembangan Income Generating Units (IGU) menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada biaya pendidikan dari peserta didik. Dengan demikian, lembaga pendidikan dapat tetap menjaga aksesibilitas bagi semua kalangan tanpa mengorbankan kualitas layanan pendidikan.

Optimalisasi endowment fund (dana abadi) dan pengembangan IGU, yang didukung oleh teknologi digital seperti blockchain dan fintech syariah, merupakan inovasi strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sistem keuangan yang lebih terpercaya, efisien, dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara instrumen keuangan sosial Islam dan teknologi, lembaga

pendidikan Islam memiliki peluang besar untuk mencapai kemandirian finansial yang kokoh di era disrupsi digital. saing global menuju Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Kurniady, D. A., Suharto, N., Suryadi, S., Hafidh, Z., & Permana, R. D. (2024). Strategic Resource Management in Islamic Boarding Schools: The Role of Income-Generating Units in Supporting Educational Goals. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(4), 1360–1375. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v8i4.9660>
- Rahmah Rahmah, Kasful Anwar US, & Sya'roni Sya'roni. (2024). Kapitalisasi Pendidikan Serta Dampaknya Bagi Pendidikan Islam. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(5), 239–243. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.555>
- Irfan, M. N., Ondeng, S., & Usman, S. (n.d.). THE COMMERCIALIZATION OF EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF MAQ Ā Ṣ ID AL-SYAR Ī ' AH.
- Mohammad, M., Kiai, U., Faqih, A., Kholis, N., Kiai, U., Faqih, A., Fahmi, M. I., Kiai, U., Faqih, A., & Muhammad, A. S. (2026). Beyond Resource Dependency: The Protective-Economy Model for Institutional Resilience in Faith-Based Enterprises. 16(1), 41–60.

- <https://doi.org/10.15642/elqist.2026.16.1.41-60>
- Khairunnisa, Aprison, W., & Pratama, A. R. (2024). Mengintegrasikan Pembiayaan Pendidikan Islam dengan Kebijakan Nasional dalam Mewujudkan SDGs No . 4 : Kajian QS . Al-Mujadallah. *Jurnal Visi Manajemen*, 10(1), 1–15. <https://stiepari.org/index.php/jvm/article/view/504>
- Ahmad Rifki, & Hamdi Abdul Karim. (2025). Strategies For Utilizing Sources and Types Of Financing In Islamic Education Management. *ICMIE Proceedings*, 2(June), 208–215. <https://doi.org/10.30983/icmie.v2i1.49>
- Ummah, M. U. (2023). Problem Komersialisasi dalam Pendidikan Islam. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 1(1), 92–112. <https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.7>
- Qur, I. A. I. A.-, & Indralaya, A. (2024). Jurnal Taujih Jurnal Pendidikan Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam PERAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM DALAM MENANGANI Jurnal Taujih Jurnal Pendidikan Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam. 6(02), 13–29.
- Zohdi, A., & Azmar, A. (2023). Supporting Students' Scientific Literacy Skills Through an Experimental KIT Module Based On Al-Quran Studies. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(5), 3780–3789. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i5.3575>
- Zohdi, A. (2017). Islamic Scientific Epistemology in Al-Jabiri Perspective. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 3(5), 23. <https://doi.org/10.21744/ijllc.v3i5.534>
- Hidayat, F. (2025). Peran Teknologi Blockchain, AI, dan ERP dalam Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Sektor Publik Syariah: Sebuah Analisis Literatur Sistematis. *Journal of Economics and Business UBS*, 14(6), 1510–1529. <https://doi.org/10.52644/bk6jxk15>
- Brawijaya, U. (2025). , Ghifary Duyufur Rohman. 13(1), 45–61.
- Ningsih, F. M., Muarrifah, S., Meliana, R., Diana, A. N., Qur, A., Ekonomi, F., Prof, U. I. N., & Zuhri, K. H. S. (2024). Citizen-Revisi-Artikel-Layouting-Edw-1. 4(2), 87–94. <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i2.542>
- Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 23–37. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.653>